



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019





GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 989/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur Riau.

KEDUA

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana maksud diktum kesatu berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019.

KETIGA

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah diverifikasi meliputi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Riau.

KEEMPAT

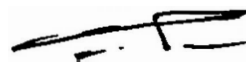
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, yang mana proses dalam penyusunan rencana kerja ini berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Provinsi Riau Tahun 2019.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Pekanbaru, 8 Agustus 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Ridwan

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019.....	II-1
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.....	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	II-2
Tabel 3.1.	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019	III-2



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 2 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini menyatakan ruang lingkup tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Permendagri tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun beserta perubahannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut terhadap rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun berjalan yang telah dievaluasi, untuk perbaikan Rencana Kerja selanjutnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) 2019 dan revisi Renstra BKD.2014-2019

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 43);
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2019;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan tahun 2019;
4. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun lalu; dan
5. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun berjalan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 adalah :

1. Terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Riau;
2. Tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
3. Terlaksananya program dan kegiatan BKD Provinsi Riau di Tahun 2019;
4. Tercapainya sasaran dan target program kegiatan BKD Provinsi Riau Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 130/SE/2019 tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019

BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian.

Berhasil atau tidaknya rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dapat dilihat dari data tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan triwulan II tahun 2019, memiliki alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 19,429,133,800,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja 9 program dan 58 kegiatan. Dari total belanja langsung tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 6,122,077,866,- dengan rata-rata realisasi capaian untuk kinerja 40,16 % dan anggaran 31.50 %.

Keterlambatan capaian realisasi baik secara kinerja maupun anggaran ini disebabkan oleh :

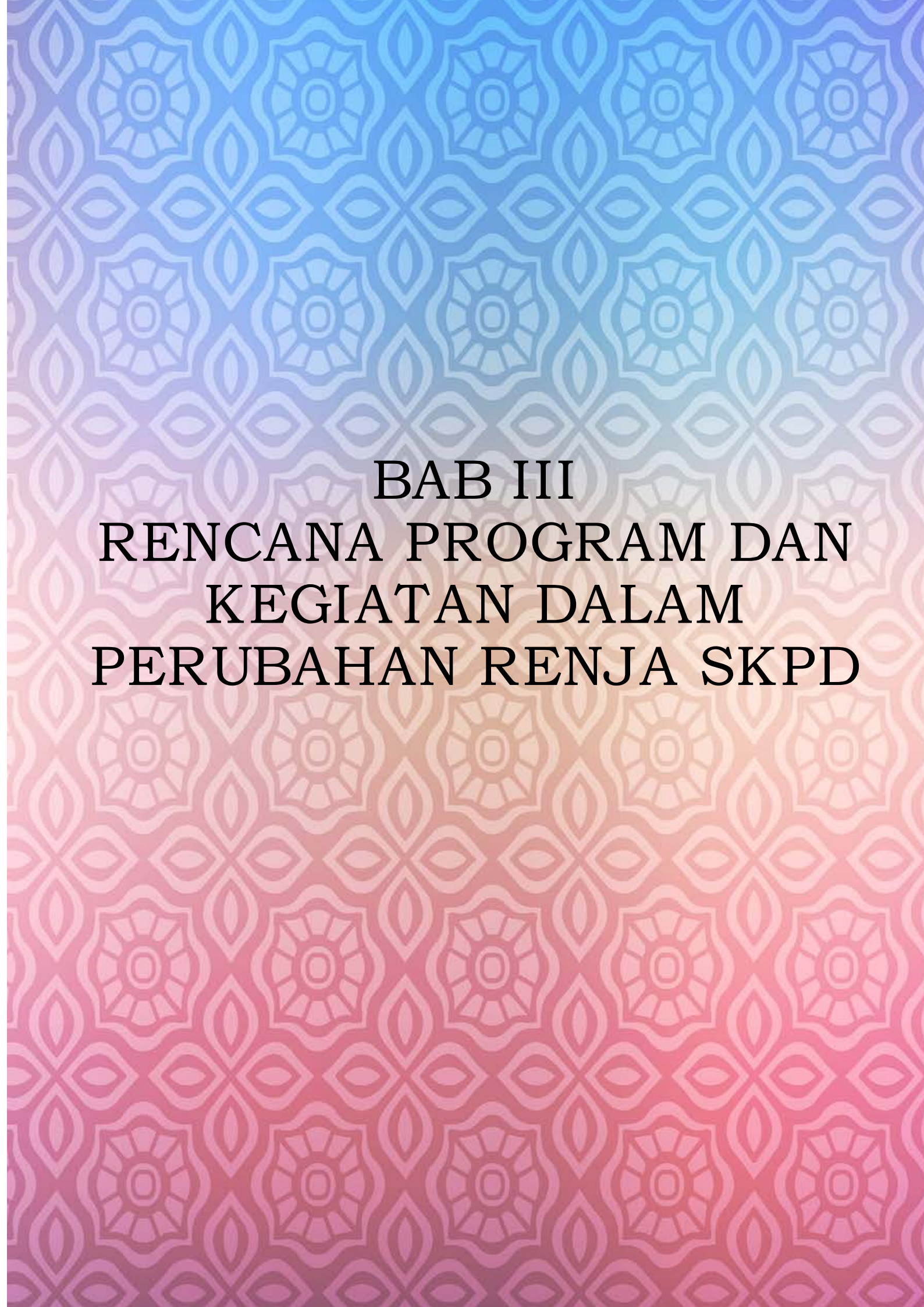
1. Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada tahun berjalan;
2. Perubahan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi.

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
s/d Triwulan II Tahun 2019

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
				I			II		III		IV		11=7+8+9+10	12=11/6x100%		13 =5+11		14 = 13/4x100									
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	15	16	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6x100%		13 =5+11		14 = 13/4x100		15	16	
	Non Urusan			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	NON URUSAN			87.850.524.077		54.050.529.717		19.429.133.800		1.526.010.875		4.582.155.991					6.122.077.866					60.172.607.583					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		22.812.549.932		20.711.544.994		4.815.562.864		517.655.468		1.456.910.812					1.974.566.280					22.686.111.274					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	16.400 surat	158.511.155	17.644	114.046.470	2.500	23.514.000	600	1.177.000	789	900.000	-	-	-	-	1.389	2.077.000	55,56	8,83	19.033	116.123.470	116,05	73,26	BADAN KEPEGAWAIAN		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	4.081.702.500	48	3.449.064.508	12	1.103.160.000	3	191.337.101	3	140.430.439	-	-	-	-	6	331.767.540	50,00	30,07	32	3.780.832.048	53,33	92,63	DAERAH PROVINSI RIAU		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	95 unit	1.266.544.714	60	1.150.323.930	14	170.291.514	4	685.250	6	64.512.000	-	-	-	-	10	65.197.250	71,43	38,29	70	1.215.521.180	73,68	95,97			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rentan waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	84.000.000	-	-	12	84.000.000	3	13.000.000	3	13.000.000	-	-	-	-	6	26.000.000	50,00	30,95	6	26.000.000	50	30,95			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	2.656.105.000	48	3.587.126.450	12	765.420.000	3	70.400.000	3	311.935.000	-	-	-	-	6	382.335.000	50,00	49,95	32	3.969.461.450	53,33	149,45			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	983.043.625	48	529.507.100	12	123.516.100	3	-	3	61.732.500	-	-	-	-	6	61.732.500	50,00	49,98	32	591.239.600	53,33	60,14			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	918.707.600	48	662.009.600	12	107.741.250	3	-	3	92.235.000	-	-	-	-	6	92.235.000	50,00	85,61	32	754.244.600	53,33	82,10			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	60 bulan	395.330.512	48	428.704.350	12	82.529.800	3	-	3	38.485.500	-	-	-	-	6	38.485.500	50,00	46,63	1.914	467.189.850	3.190	118,18			
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	422 unit	3.658.371.700	649	4.432.374.700	23	210.000.000	-	-	19	171.550.000	-	-	-	-	19	171.550.000	82,61	81,69	668	4.603.924.700	158,29	125,85			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	60 bulan	552.508.200	26	509.945.000	12	69.000.000	3	11.413.998	3	11.414.695	-	-	-	-	6	22.828.693	50,00	33,09	32	532.773.693	53,33	96,43			
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	53.308 orang	794.510.000	38.198	805.945.000	6.400	150.000.000	1.800	-	1.991	42.750.000	-	-	-	-	3.791	42.750.000	59,23	28,50	41.989	848.695.000	78,77	106,82			
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar	610 Kali	3.472.059.676	135	1.684.127.886	120	900.342.000	36	118.362.119	35	258.573.178	-	-	-	-	71	376.935.297	59,17	41,87	206	2.061.063.183	33,77	59,36			
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan	92 orang	3.044.730.450	83	2.916.829.000	12	804.388.200	3	99.280.000	3	218.740.000	-	-	-	-	6	318.020.000	50,00	39,54	89	3.234.849.000	96,74	106,24			
	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentan pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 bulan	171.660.000	-	-	12	171.660.000	3	12.000.000	3	30.652.500	-	-	-	-	6	42.652.500	50,00	24,85	6	42.652.500	50	24,85			
	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah keikut sertaan dalam pameran pembangunan Provinsi	5 kegiatan	574.764.800	3	441.541.000	1	50.000.000		-		-		-		-	-	0,00	0,00	3	441.541.000	60	76,82				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		5.187	3.932			27.826	866				
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		1.395.108.100		2.958.120.362		819.536.800		69.792.500		587.034.800					656.827.300				3.614.947.662						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang	- Unit	-	9	1.763.253.000	2	599.536.800	2	8.800.000	-	549.709.800	-	-	-	-	2	558.509.800	100,00	93,16	11	2.321.762.800	-	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedune	288 Unit	400.024.900	362	242.666.162	228	70.000.000	68	23.617.500	-	-	-	-	-	-	68	23.617.500	29,82	33,74	430	266.283.662	149,31	66,57			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan	3.040 unit	995.083.200	1.589	952.201.200	230	150.000.000	128	37.375.000	58	37.325.000	-	-	-	-	186	74.700.000	80,87	49,80	1.775	1.026.901.200	58,39	103,20			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		7.023	589			6.923	5.659				
Predikat Kinerja																		Sedang	Rendah			Sedang	Rendah				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		1.275.420.169		921.508.800		174.306.400		2.000.000		14.840.000					16.840.000				938.348.800						
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbiasa fisik dan mental	500 orang	239.594.994	591	463.295.800	135	87.769.600	135	2.000.000	135	14.840.000	-	-	-	-	270	16.840.000	200,00	19,19	861	480.135.800	172,20	200,39			
	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti konseling psikologi	750 orang	1.035.825.175	330	458.213.000	75	86.536.800		-		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	330	458.213.000	44	44,24				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100	959			1.081	12.232				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		257.290.000		-		320.000.000		-		98.571.804					98.571.804				98.571.804						
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan,	26 orang	257.290.000	-	-	26	320.000.000	-	-	17	98.571.804	-	-	-	-	17	98.571.804	65,38	30,80	17	98.571.804	65,38	38,31			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		6.538	308			6.538	3.831				
Predikat Kinerja																		Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
PENUNJANG URUSAN																											
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN																											
5	Program Pendidikan Kedisnasan	-		30.077.800.650		13.663.837.261		5.443.965.900		480.553.000		1.049.012.430					1.529.565.430				15.193.402.691						
	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	176 orang	23.089.694.096	117	11.008.025.085	39	4.553.819.200	4	464.651.000	9	979.321.030	-	-	-	-	13	1.443.972.030	33,33	31,71	130	12.451.997.115	73,86	53,93			
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat	6 orang	415.157.520	3	126.872.350	1	81.483.600	-	14.702.000	2	19.938.000	-	-	-	-	2	34.640.000	200,00	42,51	5	161.512.350	83,33	38,90			
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat	39 orang	3.785.075.434	23	1.632.609.968	3	348.539.000	-	1.200.000	1	20.021.000	-	-	-	-	1	21.221.000	33,33	6,09	24	1.653.830.968	61,54	43,69			
	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedisnasan	284 orang	2.787.873.600	49	896.329.858	55	460.124.100	-	-	7	29.732.400	-	-	-	-	7	29.732.400	12,73	6,46	56	926.062.258	19,72	33,22			

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									I		II		III		IV			11=7+8+9+10	12=11/6x100%		13 =5+11		14 = 13/4x100			
			4		5		6		7		8		9		10			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		6.985	2.169			5.961	4.244			
Predikat Kinerja																		Sedang	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-		810.927.348		810.753.676		2.227.703.800				245.022.445					258.933.445				1.069.687.121					
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	- Orang	-	13	369.524.401	22	265.088.000	-	-	22	119.229.800	-	-	-	-	22	119.229.800	100,00	44,98	35	488.754.201	-	-		
	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	50 orang	296.863.248	-	-	32	451.396.800	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	0,00	1,33	-	6.000.000	-	2,02		
	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	3.000 orang	141.357.000	2	121.345.500	1	60.630.700									-	-	0,00	0,00	2	121.345.500	0,07	85,84		
	Persemayaman dan Pemakaman Angta KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang	30 kali	172.707.100	-	-	20	27.000.000									-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat	10 orang	100.000.000	30	319.883.775	39	1.123.588.300	-	-	7	81.212.470	-	-	-	-	7	81.212.470	17,95	7,23	37	401.096.245	370	401,10		
	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat	10 orang	100.000.000	-	-	24	300.000.000	-	13.911.000	13	38.580.175	-	-	-	-	13	52.491.175	54,17	17,50	13	52.491.175	130	52,49		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		2.869	1.184			8.335	9.024			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi			
7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	-		23.851.750.745		6.833.252.653		2.983.299.800				103.326.700					622.104.900				7.455.357.553					
	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencanakarya Satya	294 orang	578.776.200	2.001	476.865.569	1.000	242.544.000	-	13.982.000	1.000	23.334.000	-	-	-	-	1.000	37.316.000	100,00	15,39	3.001	514.181.569	1020,75	88,84		
	Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Hasil monitroing PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah	4 dokumen	372.661.300	4	335.804.400	500	81.784.900	-	-	299	48.857.500	-	-	-	-	299	48.857.500	59,80	59,74	303	384.661.900	7.575	103,22		
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang di	5 dokumen	924.680.900	4	642.343.100	16.737	150.507.600	-	-	8.400	8.885.600	-	-	-	-	8.400	8.885.600	50,19	5,90	8.404	651.228.700	168.080	70,43		
	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan	1.086 orang	5.842.223.910	862	996.689.395	250	390.950.700	-	-	110	137.398.200	-	-	-	-	110	137.398.200	44,00	35,14	972	1.134.087.595	89,50	19,41		
	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian jajah	Jumlah Pegawai negeri sipil yang mengikuti ujian dinas dan ujian	1.640 orang	1.335.819.000	1.589	991.772.650	200	150.000.000	-	-	-	17.561.000	-	-	-	-	-	17.561.000	0,00	11,71	1.589	1.009.333.650	96,89	75,56		
	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah dokumen yang terpelihara	13.000 dokumen	1.077.082.100	9.495	862.940.800	7.000	236.156.000	1.260	39.679.000	3.929	91.708.000	-	-	-	-	5.189	131.387.000	74,13	55,64	14.684	994.327.800	112,95	92,32		
	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang dikelola	4 Dokumen	295.277.000	1	282.944.100	4	135.486.100	-	22.265.700	2	16.430.000	-	-	-	-	2	38.695.700	50,00	28,56	3	321.639.800	75	108,93		
	Pemantauan disiplin PNS	Pemantauan disiplin PNS	2 dokumen	480.900.000	-	-	2	67.147.800	-	8.000.000	1	26.263.200	-	-	-	-	1	34.263.200	50,00	51,03	1	34.263.200	50	7,12		
	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	120 Kasus	370.925.000	-	-	80	84.164.000	-	-	51	15.946.000	-	-	-	-	51	15.946.000	63,75	18,95	51	15.946.000	42,50	4,30		
	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Perlombaan Dalam	600 orang	536.934.800	1	144.832.000	200	135.619.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	144.832.000	0,17	26,97			
	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	4 dokumen	760.853.077	3	498.328.000	1	150.000.000	-	15.400.000	0,30	43.445.000	-	-	-	-	0,30	58.845.000	30,00	39,23	3,30	557.173.000	82,50	73,23		
	Pengembangan E-vernment Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen	15 Aplikasi	8.789.617.458	2	832.517.430	1	217.015.700	-	4.000.000	-	28.932.000	-	-	-	-	-	32.932.000	0,00	15,17	2	865.449.430	13,33	9,85		
	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah jabatan tinggi yang terseleksi melalui uji kompetensi	101 orang	2.486.000.000	67	768.215.209	34	741.923.400	-	-	-	23.458.700	-	-	-	-	-	23.458.700	0,00	3,16	67	791.673.909	66,34	31,85		
	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	- Jabatan	-	-	-	1.200	200.000.000	-	-	-	36.559.000	-	-	-	-	-	36.559.000	0,00	18,28	-	36.559.000	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		3.728	2.556			126.646	5.086			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah			
8	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	-		6.644.818.379		6.987.742.173		2.357.982.436				307.770.059					888.442.359				7.876.184.532					
	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS yang terkelola	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang terkelola	1.100 orang	94.691.700	25.194	1.077.490.938	1.500	350.000.000	233	75.050.559	222	105.815.800	-	-	-	-	455	180.866.359	30,33	51,68	25.649	1.258.357.297	2331,73	1328,90		
	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi	16.460 orang	-	11.832	1.546.122.550	4.000	299.320.000	3.791	23.870.000	2.200	86.604.000	-	-	-	-	5.991	110.474.000	149,77	36,91	17.823	1.656.596.550	108,28	-		
	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan	11.890 SK	1.609.740.900	5.819	1.283.921.790	1.100	324.150.000	146	14.564.000	498	91.130.700	-	-	-	-	644	105.694.700	58,55	32,61	6.463	1.389.616.490	54,36	86,33		
	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.160 berkas	859.755.645	5.729	477.248.400	350	264.310.000	66	29.003.000	23	13.880.000	-	-	-	-	89	42.883.000	25,43	16,22	5.818	520.131.400	501,55	60,50		
	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan	1.336 Formasi PNS	1.370.964.432	62	896.255.400	250	184.795.400	-	19.782.000	-	-	-	-	-	-	-	19.782.000	0,00	10,70	62	916.037.400	4,64	66,82		
	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan	7.095 Orang	1.029.331.000	2.960	659.299.444	500	122.138.900	-	31.194.500	-	15.506.000	-	-	-	-	-	46.700.500	0,00	38,24	2.960	705.999.944	41,72	68,59		
	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang	452 dokumen	536.995.500	3	401.718.200	1	137.068.000	-	10.400.000	-	84.843.000	-	-	-	-	-	95.243.000	0,00	69,49	3	496.961.200	0,66	92,54		
	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan	300 SK	388.974.100	58	135.830.451	50	117.579.100	-	6.706.000	17	13.812.000	-	-	-	-	17	20.518.000	34,00	17,45	75	156.348.451	25	40,20		
	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi	Jumlah Dokumen Verifikasi usulan kenaikan pangkat	8.000 berkas	525.016.000	5.882	368.536.000	4.000	350.000.000	3.791	89.200.000	2.200	104.290.600	-	-	-	-	5.991	193.490.600	149,77	55,28	11.873	562.026.600	148,41	107,05		
	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengusulkan usulan gelar	100 orang	144.349.102	109	14.303.000	50	36.495.000	-	-	50	2.836.000	-	-	-	-	50	2.836.000	100,00	7,77	159	17.139.000	159	11,87		
	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	1 Aplikasi	85.000.000	1	127.016.000	1	172.126.036	-	8.000.000	3	61.954.200	-	-	-	-	3	69.954.200	300,00	40,64	4	196.970.200	400	231,73		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		7.708	3.427			34.321	19.041			
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	-		724.858.754		1.163.769.798		286.775.800				44.913.148					76.226.348				1.239.996.146					

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									I		II		III		IV										
									7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11/6x100%	13 =5+11								14 = 13/4x100		15
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	400	Orang	320	478.996.200	100	96.933.000	-	-	7.635.200	-	-	-	-	0,00	7,88	320	486.631.400	80	-				
	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan	1.455	Sk	724.858.754	904	684.773.598	500	189.842.800	-	44.913.148	220	23.678.000	-	-	220	68.591.148	44,00	36,13	1.124	753.364.746	77,25	103,93		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															22	22			7.863	5.197					
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 9)															5.804	2.822			152.782	8.108					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 9)															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :-																									
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya :-																									
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya :-																									



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada perubahan rencana kerja tahun 2019 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019 dalam aspek Peningkatan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau Pusat Pembinaan Aparatur serta Peningkatan pengembangan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai Pusat Pengembangan Aparatur dengan Tata Pemerintah yang baik.

Adapun rincian perubahan rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dituangkan dalam Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Riau di bawah ini:

Berdasarkan tabel 3.1. Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Bkd Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dicermati hal- hal sebagai berikut :

A. Program yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Riau Tahun 2019 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu sebesar 4,815,562,864.00 menjadi 5,083,787,314.00
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari pagu 320,000,000.00 sebesar menjadi 600,500,000.00
3. Program Pendidikan Kedinasan dari pagu 5,443,965,900.00sebesar menjadi 4,359,810,700.00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dari pagu sebesar 2,227,703,800.00 menjadi 1,205,636,600.00
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur dari pagu sebesar 2,983,299,800.00 menjadi 2,603,146,200.00
6. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara dari pagu sebesar 2,357,982,436.00 menjadi 2,407,161,500.00
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur dari pagu 286,775,800.00 sebesar menjadi 276,775,800.00

B. Kegiatan yang mengalami perubahan di Renja Perubahan BKD Provinsi Riau Tahun 2019 :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari pagu sebesar 23,514,000.00 menjadi 13,512,000.00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dari pagu sebesar 1,103,160,000.00 menjadi 980,810,000.00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari pagu sebesar 170,291,514.00 menjadi 159,491,514.00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari pagu sebesar 765,420,000.00 menjadi 739,076,000.00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dari pagu sebesar 123,516,100.00 menjadi 104,042,000.00

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari pagu sebesar 107,741,250.00 menjadi 192,235,000.00
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari pagu sebesar 82,529,800.00 menjadi 70,691,800.00
8. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dari pagu sebesar 210,000,000.00 menjadi 373,050,000.00
9. Penyediaan Makanan Dan Minuman dari pagu 150,000,000.00 menjadi 156,000,000.00
10. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dari pagu 900,342,000.00 menjadi 1,199,673,400.00
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dari pagu 804,388,200.00 menjadi 788,785,600.00
12. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD dari pagu 171,660,000.00 menjadi 153,420,000.00
13. Pameran Pembangunan (Riau Expo) dari pagu 50,000,000.00 menjadi 0.00
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dari pagu 599,536,800.00 menjadi 994,593,800.00
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dari pagu 150,000,000.00 menjadi 145,900,000.00
16. Pendidikan Dan Pelatihan Formal dari pagu 320,000,000.00 menjadi 600,500,000.00
17. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara dari pagu 4,553,819,200.00 menjadi 3,707,462,800.00
18. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) dari pagu 348,539,000.00 menjadi 185,544,000.00
19. Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas dari pagu 460,124,100.00 menjadi 385,320,300.00
20. PORNAS Korpri dari pagu 451,396,800.00 menjadi 205,840,800.00
21. Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau dari pagu 1,123,588,300.00 menjadi 388,028,600.00
22. Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau dari pagu

- 300,000,000.00 menjadi 280,000,000.00
23. Satya Lencana Karya Satya dari pagu 242,544,000.00 menjadi 192,544,000.00
 24. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari pagu 150,000,000.00 menjadi 107,804,000.00
 25. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) dari pagu 236,156,000.00 menjadi 201,737,000.00
 26. Penanganan Kasus kasus kepegawaian dari pagu 84,164,000.00 menjadi 134,164,000.00
 27. Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau dari pagu 217,015,700.00 menjadi 192,015,700.00
 28. Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau dari pagu 741,923,400.00 menjadi 609,004,400.00
 29. Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau dari pagu 200,000,000.00 menjadi 190,000,000.00
 30. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS dari pagu 350,000,000.00 menjadi 408,838,000.00
 31. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau dari pagu 299,320,000.00 menjadi 295,560,000.00
 32. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu dari pagu 324,150,000.00 menjadi 299,703,000.00
 33. Pengelolaan Administrasi kepegawaian dari pagu 264,310,000.00 menjadi 254,060,000.00
 34. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau dari pagu 184,795,400.00 menjadi 189,795,400.00
 35. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dari pagu 122,138,900.00 menjadi 253,244,900.00
 36. Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu dari pagu 117,579,100.00 menjadi 20,518,000.00
 37. Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau dari pagu 172,126,036.00 menjadi 161,879,200.00

38. Pengelolaan Pensiun PNS dari pagu 189,842,800.00 menjadi
179,842,800.00



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari pembahasan dokumen rencana kerja perubahan tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau sampai dengan triwulan II tahun 2019 dari total belanja langsung Rp. 19,429,133,800,- terealisasi sebesar Rp. 6,122,077,866,- atau 31.50 % untuk anggaran dan kinerja 40,16 %;
2. Untuk rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja BKD Provinsi Riau tahun 2019 adalah :
 - a. Total belanja rencana kerja tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp. 37,331,128,662,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 17.901.994.862,- dan belanja langsung Rp. 19,429,133,800,-;
 - b. Sedangkan total belanja rencana kerja tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 38,181,731,548,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 20.260.113.234,- dan belanja langsung Rp. 17,921,618,314,-

4.2. Saran

Untuk percepatan pencapaian realisasi rencana kerja tahun 2019 selanjutnya adalah :

1. Menyesuaikan rencana aksi yang akan disusun pada rencana kerja perubahan;
2. Melakukan perubahan terhadap target kinerja dan indikator yang ingin dicapai;
3. Menyesuaikan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Tabel 3.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BELANJA DAERAH									37.331.128.662,00	38.181.731.548,00						
	BELANJA LANGSUNG									17.901.994.862,00	20.260.113.234,00	124					
	BELANJA LANGSUNG									19.429.133.800,00	17.921.618.314,00				29.978.016,13		
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik					100 Persen	100 Persen	4.815.562.864,00	5.083.787.314,00				6.387.862,46		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Jumlah surat yang dikirim	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	2500 Surat	2500 Surat	23.514.000,00	13.512.000,00	APBD I	APBD I	2500 Surat	23.517,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	1.103.160.000,00	980.810.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	1.236.229,50	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	14 Unit	14 Unit	170.291.514,00	159.491.514,00	APBD I	APBD I	14 Unit	190.691,51	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	2 orang	2 orang	84.000.000,00	84.000.000,00	APBD I	APBD I	2 orang	84.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	765.420.000,00	739.076.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	823.500,00	Sedang Berjalan	16.825.879.810,25
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor daerah	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor daerah	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	123.516.100,00	104.042.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	100.500,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	107.741.250,00	192.235.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	107.741,25	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Rentang waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 bulan	12 bulan	82.529.800,00	70.691.800,00			12 bulan	92.960,99	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	23 Unit	42 Unit	210.000.000,00	373.050.000,00			110 Unit	1.376.566,62	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	69.000.000,00	69.000.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	159.951,20	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	6.400 Porsi	6.400 Porsi	150.000.000,00	156.000.000,00	APBD I	APBD I	7.386 Porsi	202.000,00	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	-	-	Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	120 Kali	142 Kali	900.342.000,00	1.199.673.400,00	APBD I	APBD I	120 Kali	852.781,58	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	804.388.200,00	788.785.600,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	809.085,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.022.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	Rentang waktu pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	12 Bulan	12 Bulan	171.660.000,00	153.420.000,00	APBD I	APBD I	12 Bulan	178.337,80	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Kali	-	50.000.000,00	0,00	APBD I	APBD I	1 Kali	150.000,00	Lanjutan	
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja					100 Persen	100 Persen	819.536.800,00	1.210.493.800,00				1.097.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	2 Unit	3 Unit	599.536.800,00	994.593.800,00	APBD I	APBD I	5 Unit	800.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	228 Unit	228 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD I	APBD I	228 Unit	70.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	230 Unit	230 Unit	150.000.000,00	145.900.000,00	APBD I	APBD I	253 unit	227.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur					100 Persen	100 Persen	174.306.400,00	174.306.400,00				347.855,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.03.006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan Mental	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	135 Orang	135 Orang	87.769.600,00	87.769.600,00	APBD I	APBD I	135 Orang	62.240,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling Psikologi	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling Psikologi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	75 Orang	75 Orang	86.536.800,00	86.536.800,00	APBD I	APBD I	150 Orang	285.615,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara					100 Persen	100 Persen	320.000.000,00	600.500.000,00				368.605,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.00.03.3.00.03.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	-	-	pekanbaru	pekanbaru	26 Orang	48 Orang	320.000.000,00	600.500.000,00	APBD I	APBD I	29 Orang	368.605,00		
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pendidikan Kedinasan		Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan dan tugas belajar					50 Orang	50 Orang	5.443.965.900,00	4.359.810.700,00				7.523.704,70		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	-	-	Luar daerah	Luar daerah	39 Orang	33 Orang	4.553.819.200,00	3.707.462.800,00	APBD I	APBD I	50 Orang	5.528.600,20	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	1 Orang	1 Orang	81.483.600,00	81.483.600,00	APBD I	APBD I	1 Orang	89.439,60	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	3 Orang	1 Orang	348.539.000,00	185.544.000,00	APBD I	APBD I	10 Orang	980.064,90	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni sekolah Kedinasan	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni sekolah Kedinasan	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	55 Orang	164 Orang	460.124.100,00	385.320.300,00	APBD I	APBD I	50 Orang	925.600,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara					-	100 Persen	2.227.703.800,00	1.205.636.600,00				4.742.132,30		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.16.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	22 Orang	22 Orang	265.088.000,00	255.088.000,00	APBD I	APBD I	22 Orang	370.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.068.	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	32 orang	32 orang	451.396.800,00	205.840.800,00	APBD I	APBD I	32 orang	483.295,40	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.630.700,00	49.679.200,00	APBD I	APBD I	1 Kegiatan	90.053,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	20 kali	20 kali	27.000.000,00	27.000.000,00	APBD I	APBD I	25 kali	59.769,10	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.080.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	39 Orang	19 Orang	1.123.588.300,00	388.028.600,00	APBD I	APBD I	60 Orang	1.520.038,80	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.00.03.3.00.03.01.16.081.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	24 Orang	16 Orang	300.000.000,00	280.000.000,00	APBD I	APBD I	70 Orang	2.218.976,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional					100 Persen	100 Persen	2.983.299.800,00	2.603.146.200,00				5.219.678,37		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.17.031.	Satya Lancana Karya Satya	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1000 Orang	1000 Orang	242.544.000,00	192.544.000,00	APBD I	APBD I	1200 Orang	346.912,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	81.784.900,00	81.784.900,00	APBD I	APBD I	500 Orang	125.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	jumlah SKP PNS yang diverivikasi	jumlah SKP PNS yang diverivikasi	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	16.737 orang	16.737 orang	150.507.600,00	150.507.600,00	APBD I	APBD I	16.737 orang	170.777,60	Sedang	
3.00.03.3.00.03.01.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanaka sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanaka sesuai dengan kebutuhan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	250 Orang	250 Orang	390.950.700,00	390.950.700,00	APBD I	APBD I	250 Orang	978.606,27	Sedang	
3.00.03.3.00.03.01.17.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuain ijazah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuain ijazah	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	107.804.000,00	APBD I	APBD I	400 Orang	413.150,00	Sedang	
3.00.03.3.00.03.01.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	7000 dokumen	7000 dokumen	236.156.000,00	201.737.000,00	APBD I	APBD I	7000 dokumen	300.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.076.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah dokumen data kepegawaian Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4 Dokumen	4 Dokumen	135.486.100,00	135.486.100,00	APBD I	APBD I	7 Dokumen	450.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.087.	Pemantauan disiplin PNS	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	20%	20%	67.147.800,00	67.147.800,00	APBD I	APBD I	20%	180.900,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.088.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani	Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	80%	80%	84.164.000,00	134.164.000,00	APBD I	APBD I	80%	185.925,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.098.	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	200 Orang	-	135.619.600,00	0	APBD I	APBD I	200 Orang	182.407,50	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	-	-	Kab/Kota	Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD I	APBD I	1 dokumen	200.000,00	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.00.03.3.00.03.01.17.114.	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat at untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau		-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Sistem/Apli kasi/Modul	1 Sistem/Apli kasi/Modul	217.015.700,00	192.015.700,00	APBD I	APBD I	1 Sistem/Apli kasi/Modul	500.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.115.	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	34 JPT	34 JPT	741.923.400,00	609.004.400,00	APBD I	APBD I	34 JPT	986.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.137.	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1200 Jabatan	1168 Jabatan	200.000.000,00	190.000.000,00	APBD I	APBD I	1200 Jabatan	200.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan					85 Persen	85 Persen	2.357.982.436,00	2.407.161.500,00				3.799.939,50		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	-	-	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	1500 Orang	1500 Orang	350.000.000,00	408.838.000,00	APBD I	APBD I	1500 Orang	400.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4.000 Orang	4.000 Orang	299.320.000,00	295.560.000,00	APBD I	APBD I	4	500.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Provinsi Riau	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1100 Orang	1100 Orang	324.150.000,00	299.703.000,00	APBD I	APBD I	1100 Orang	600.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah Berkas Kepegawaian Yang Dikelola	Jumlah Berkas Kepegawaian Yang Dikelola	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	350 Berkas	350 Berkas	264.310.000,00	254.060.000,00	APBD I	APBD I	450 Berkas	380.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	250 Formasi	250 Formasi	184.795.400,00	189.795.400,00	APBD I	APBD I	500 Formasi	393.650,50	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan kompetensinya	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	500 Orang	300 Orang	122.138.900,00	253.244.900,00	APBD I	APBD I	500 Orang	683.349,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	137.068.000,00	137.068.000,00	APBD I	APBD I	1 Dokumen	168.500,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pengelolaan Penetapan Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pengelolaan Penetapan Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	50 Orang	50 Orang	117.579.100,00	20.518.000,00	APBD I	APBD I	50 Orang	125.000,00	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.00.03.3.00.03.01.18.025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	4000 Berkas	4000 Berkas	350.000.000,00	350.000.000,00	APBD I	APBD I	4000 Berkas	384.800,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	50 Orang	50 Orang	36.495.000,00	36.495.000,00	APBD I	APBD I	50 Orang	50.000,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.18.029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	1 Aplikasi	1 Aplikasi	172.126.036,00	161.879.200,00	APBD I	APBD I	1 Aplikasi	114.640,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti					2 Persen	2 Persen	286.775.800,00	276.775.800,00				491.238,80		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	100 Orang	100 Orang	96.933.000,00	96.933.000,00	APBD I	APBD I	200 Orang	258.740,00	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	-	-	Pekanbaru	Pekanbaru	500 Orang	500 Orang	189.842.800,00	179.842.800,00	APBD I	APBD I	500 Orang	232.498,80	Sedang Berjalan	
TOTAL										19.429.133.800,00	17.921.618.314,00						

